PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 18 Maret 2010 Halaman: 13

KPK

Pastikan Perkembangan Pencegahan Korupsi

JOGJA - Tim Penelitian dan Pengembangan-gan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Jogja, kemarin (17/3). Penegak hukum *superbody* ini ingin memastikan perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab sejak 2006 silam, Kota Jogja menjadi daerah percontohan pencegahan tindak pidana korupsi.

''Jogja termasuk salah satu di antara enam kota yang dijadikan model tersebut. Selain Kota Jogja, ada Kabupaten Solok, Kabupaten Jembrana, Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kota Denpasar. Model di beberapa kota ini dijadikan *best practice* untuk disebarkan ke daerah lain di Indonesia,'' kata Kepala Tim Litbang KPK Luthfi Ganna Sukardi di balai kota, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kunjungan ini, timnya ingin memastikan kondisi beberapa layanan yang diberikan pemkot ■

▸ Baca **Pastikan...** Hal 23

Jadi Dorongan bagi Pemkot

■ **PASTIKAN...**

Sambungan dari hal 13

Seperti layanan kesehatan, sumber daya manusianya (PNS), perizinan, dan pendidikan. Empat bidang tersebut, kemarin ditinjau tim litbang KPK untuk diketahui sejauh mana peningkatan yang terjadi sejak tahun 2006 silam.

''Sekarang kami ingin kembali melihat apakah perkembangan peningkatan kesejahteraan atau peran masyarakat. Atau malah ada inovasi baru yang dikembangkan oleh Pemkot Jogja,'' terangnya.

Di beberapa daerah lain yang dijadikan ikon *best practice* ada daerah-daerah yang terlihat stagnan bahkan menurun. Mereka melihat di Jogja ada beberapa pembaharuan sejak 2006 lalu, dan berharap masih menjadi ikon inovasi terbarukan. Gebrakan-gebrakan inovatif di Jogja akan mereka ungkapkan lagi sebagai bahan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah lain.

Di Kota Jogja, berbagai layanan kepada masyarakat memang membuat peluang terjadinya tindak korupsi kian tipis. Mulai dari UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), layanan satu atap, sampai program terbaru Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bentuk program terakhir ini merupakan badan untuk pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta.

ULP, kata Wali Kota Herry Zudianto, berfungsi mencegah potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. ''Alhamdulillah, program-program tersebut dapat bekerja efektif dengan mendapatkan apresiasi dari KPK,'' kata Herry.

Herry menjelaskan, kedatangan Litbang KPK tersebut bakal menjadi dorongan bagi pihaknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hery berharap, dengan dibukanya saluran komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat, cita-cita *good governance* bisa terwujud.

''Mungkin, setelah Litbang KPK ini pulang ke Jakarta, kami akan melakukan inovasi lagi. Entah, nanti dari sektor apa, saat ini sedang dipikirkan,'' katanya. **(eri)**

epa
ta
Wal
aris
n ...
pada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna 2. Bagian Humas dan Informasi 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perizinan 6. 7. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005